



MANDALA BAKTI

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Published by Yasin Publisher (Yayasan Amal Sosial Islami Nahdliyin)

Journal homepage: <https://yasinpublisher.org/index.php/mandalabakti/>



Penerapan Kompetensi Teknik Informatika Dalam Mendukung Layanan Digital Pertanahan Melalui Program MBKM di Kantor BPN Kabupaten Kuantan Singingi

Feby Nezelia^{1*}, Fitria Arum^{2*}, Delciani^{1*}

¹ Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kuantan Singingi

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

*Correspondence: E-mail: fnazelya@gmail.com

Abstrak

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan ruang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar kampus melalui kegiatan magang. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan kompetensi Teknik Informatika dalam mendukung layanan digital pertanahan selama pelaksanaan MBKM di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, keterlibatan langsung, dan dokumentasi selama magang berlangsung. Hasil menunjukkan bahwa mahasiswa mampu menerapkan berbagai keterampilan, seperti analisis sistem, pengelolaan data, perancangan antarmuka, dan penerapan keamanan jaringan untuk mendukung proses digitalisasi pelayanan publik. Pelaksanaan MBKM ini memperlihatkan sinergi nyata antara dunia pendidikan dan dunia kerja serta memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan di lingkungan profesional, khususnya sektor pemerintahan.



Copyright (c) 2025 Feby Nezelia, Fitria Arum, Delciani.

Artikel Info

Article History:

Submitted/Received:

02/03/2025

First Revised: 03/04/2025

Accepted: 15/04/2025

Publication Date: 10/05/2025

Kata Kunci:

MBKM,
Badan Pertanahan Nasional,
Digitalisasi Layanan Publik,

1. Pendahuluan

Pada era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, digitalisasi telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung transformasi pelayanan publik di Indonesia. Kehadiran teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sistem birokrasi menuju arah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara konsisten terus mendorong percepatan implementasi layanan berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya ini menjadi semakin penting mengingat kebutuhan publik yang semakin dinamis dan menuntut pelayanan yang cepat, mudah diakses, serta mampu memberikan kepastian hukum.

Salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam lingkup pelayanan publik adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lembaga ini memiliki mandat penting dalam hal pengelolaan administrasi pertanahan, pendataan kepemilikan tanah, pengaturan tata ruang, hingga penerbitan berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan hak kepemilikan maupun hak guna tanah. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya berdampak langsung pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi nasional. Tanah merupakan aset vital bagi masyarakat, baik sebagai tempat tinggal, sarana produksi, maupun sebagai modal dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, keberadaan BPN sebagai pengelola administrasi pertanahan memiliki posisi yang sangat strategis dalam memberikan jaminan kepastian hukum terkait hak atas tanah.

Dalam praktiknya, pelayanan pertanahan bukanlah hal yang sederhana. Proses administrasi yang dilakukan BPN melibatkan tahapan yang panjang, mencakup pengumpulan, verifikasi, validasi, hingga pengarsipan berbagai data yang bersifat penting dan sensitif. Data tersebut mencakup informasi mengenai kepemilikan, batas wilayah, riwayat transaksi, serta status hukum suatu lahan. Kompleksitas inilah yang menjadikan digitalisasi sistem layanan pertanahan sebagai kebutuhan mendesak. Tanpa penerapan teknologi digital, proses pelayanan akan cenderung lambat, berpotensi menimbulkan kesalahan administratif, bahkan membuka peluang terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi.

Digitalisasi di lingkungan BPN diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan sistem yang lebih terintegrasi, cepat, dan akurat. Penerapan sistem berbasis teknologi dapat mengurangi birokrasi yang berbelit, mempercepat waktu pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pertanahan. Misalnya, layanan pendaftaran tanah secara elektronik memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengajuan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor BPN. Hal ini tidak hanya efisien dari sisi waktu dan biaya, tetapi juga sejalan dengan visi pemerintah dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Lebih jauh lagi, digitalisasi pertanahan juga memiliki kontribusi besar dalam mencegah konflik agraria yang kerap terjadi akibat tumpang tindih data atau ketidakjelasan status kepemilikan. Dengan sistem yang transparan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang valid mengenai status tanah mereka. Hal ini tentu mendukung terciptanya kepastian hukum yang lebih kuat, sekaligus memperkuat rasa keadilan di tengah masyarakat. Selain itu, dari sisi pemerintah, data yang terintegrasi dan terdigitalisasi akan menjadi basis penting dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, hingga pengendalian tata ruang wilayah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi layanan publik, khususnya di Badan Pertanahan Nasional, merupakan langkah strategis yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memberikan dampak luas bagi pembangunan nasional. Transformasi digital pada layanan pertanahan menjadi pondasi penting dalam menciptakan

birokrasi yang modern, adaptif, serta mampu menjawab tantangan era globalisasi. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berkontribusi secara nyata dalam transformasi layanan publik. Melalui kegiatan magang di instansi pemerintahan, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktis tetapi juga mengembangkan soft skill yang relevan dengan dunia kerja. Bagi mahasiswa Teknik Informatika, kegiatan magang di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sarana strategis untuk mengaplikasikan kompetensi di bidang teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang lebih profesional.

Mahasiswa yang terlibat dalam program ini memiliki peran dalam mendukung berbagai aktivitas digitalisasi, mulai dari pemeliharaan basis data layanan pertanahan, perancangan sistem informasi pelacakan dokumen, hingga pendampingan pegawai dalam pemanfaatan aplikasi berbasis web. Keikutsertaan mahasiswa juga menjadi bagian penting dalam peningkatan kapasitas instansi dalam menghadapi tantangan perubahan teknologi dan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik.

Dalam praktik pelayanan publik, BPN telah melakukan berbagai inovasi sistem informasi, salah satunya melalui penerapan **Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP)**. Sistem ini mempermudah pengelolaan data pendaftaran tanah, pemrosesan sertifikat, hingga penyimpanan arsip digital. Namun demikian, efektivitas penggunaan sistem tersebut sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dalam pengoperasian aplikasi dan pemahaman prosedur digital. Oleh sebab itu, kehadiran mahasiswa magang diharapkan mampu mendukung optimalisasi pemanfaatan sistem dan membantu proses perbaikan alur kerja berbasis teknologi.

Selain itu, digitalisasi layanan pertanahan juga memunculkan tantangan baru, terutama terkait perlindungan data masyarakat yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Data pemilik tanah, batas wilayah, serta status hukum menjadi bagian penting yang harus dijaga integritas dan keamanannya. Mahasiswa Teknik Informatika melalui kompetensi keamanan jaringan memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi dalam evaluasi sistem proteksi data dan penyusunan rekomendasi kebijakan pengamanan informasi.

Program MBKM menjadi wahana pembelajaran berbasis pengalaman yang efektif dalam menyiapkan mahasiswa sebagai lulusan yang adaptif, mandiri, dan inovatif. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu memahami teori, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kebutuhan instansi dan mampu menciptakan solusi kreatif yang tepat guna. Keberhasilan pelaksanaan MBKM di BPN Kabupaten Kuantan Singingi menjadi salah satu bukti bahwa kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah dapat menghasilkan sinergi yang bermanfaat bagi penguatan kapasitas pelayanan publik.

Kegiatan magang juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa dalam mengelola data secara profesional. Dalam kegiatan harian, mahasiswa terlibat dalam proses input data permohonan sertifikat, validasi berkas elektronik, hingga pengarsipan digital. Melalui pengalaman ini, mahasiswa semakin memahami pentingnya ketelitian dalam pengolahan data, serta risiko jika data tidak dikelola dengan baik. Di samping itu, mahasiswa juga belajar melakukan analisis kebutuhan pengguna (user requirement) sebagai dasar dalam merancang sistem pendukung yang lebih efisien.

Dengan latar belakang tersebut, kegiatan ini bertujuan mendeskripsikan secara detail bagaimana kompetensi multidisiplin Teknik Informatika diimplementasikan dalam mendukung digitalisasi layanan pertanahan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pihak kampus maupun instansi lain yang akan menyelenggarakan kegiatan serupa, sekaligus sebagai bukti nyata kontribusi mahasiswa terhadap percepatan transformasi digital sektor publik.

2. Metodologi Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan observasi langsung, wawancara tidak terstruktur, serta dokumentasi aktivitas lapangan. Lokasi pengabdian adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan salah satu unit kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor pertanahan memiliki peran vital dalam pelayanan publik, khususnya dalam hal administrasi dan digitalisasi layanan pertanahan. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung selama empat bulan, yaitu sejak tanggal 10 Februari hingga 10 Juni 2025, sehingga tim pelaksana memiliki cukup waktu untuk melakukan pendampingan, pengamatan, sekaligus mendokumentasikan proses yang terjadi.

Subjek dalam kegiatan pengabdian ini adalah mahasiswa Program Studi Teknik Informatika yang terlibat secara penuh waktu berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan pihak BPN. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta, melainkan juga sebagai fasilitator yang mendukung percepatan implementasi sistem pelayanan digital. Kehadiran mahasiswa informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman teknologi, pemetaan kebutuhan digitalisasi, serta memberikan edukasi kepada pegawai maupun masyarakat terkait pemanfaatan layanan elektronik pertanahan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini diarahkan untuk memberikan manfaat langsung, baik bagi mahasiswa dalam bentuk pengalaman praktis, maupun bagi instansi BPN sebagai bentuk kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara terpadu. Observasi harian digunakan untuk mencatat alur layanan pertanahan, mulai dari penerimaan berkas, proses verifikasi, hingga pencatatan data secara digital. Logbook aktivitas disusun sebagai catatan harian untuk merekam setiap kegiatan mahasiswa maupun tim pengabdian di lapangan. Selain itu, dilakukan wawancara tidak terstruktur dengan pembimbing lapangan dan pegawai BPN guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tantangan, hambatan, serta kebutuhan yang muncul dalam pelayanan digital. Sementara itu, dokumentasi meliputi pencatatan dokumen pendukung, foto kegiatan, serta materi administrasi yang relevan sebagai bukti pelaksanaan pengabdian.

Proses analisis kegiatan dilakukan secara bertahap. Pertama, data lapangan dikumpulkan dari berbagai sumber. Kedua, dilakukan identifikasi aktivitas pengabdian yang relevan dengan kebutuhan mitra, khususnya dalam peningkatan literasi digital pertanahan. Ketiga, dilakukan pemetaan kompetensi mahasiswa yang diterapkan selama kegiatan, misalnya kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi layanan elektronik, mengelola basis data, serta memberikan sosialisasi teknologi kepada pegawai. Selanjutnya, disusun deskripsi peran mahasiswa dalam mendukung transformasi digital di kantor pertanahan, sehingga terlihat kontribusi nyata kegiatan pengabdian terhadap peningkatan kapasitas mitra.

Untuk menjaga keberlanjutan dan keabsahan kegiatan, dilakukan validasi data dengan metode triangulasi sumber. Validasi ini melibatkan diskusi bersama pembimbing lapangan dari pihak BPN dan dosen pembimbing akademik dari perguruan tinggi. Langkah ini penting agar hasil kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra dan memiliki dampak nyata di lapangan. Selain itu, evaluasi kegiatan juga dilakukan melalui refleksi bersama mahasiswa, dosen, dan pihak BPN guna menilai sejauh mana capaian tujuan pengabdian serta merumuskan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan di masa mendatang.

Dengan demikian, metode pengabdian ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai sinergi antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan instansi mitra dalam mendukung digitalisasi layanan publik. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi

peningkatan kompetensi mahasiswa, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi BPN dalam memperkuat pelayanan pertanahan berbasis teknologi informasi..

3. Hasil dan Pembahasan

Selama pelaksanaan MBKM, mahasiswa mendapatkan berbagai pengalaman nyata, di antaranya:

1. Administrasi dan Pengelolaan Data: Mahasiswa membantu proses input data sertifikat tanah, pengarsipan digital, serta verifikasi dokumen
2. Penerapan Keamanan Jaringan dan Data: Mahasiswa memberikan saran terkait penerapan firewall, backup data, dan autentikasi sistem.
3. Analisis Sistem dan Rancang Bangun Aplikasi: Mahasiswa membuat rancangan sistem pelacakan status sertifikat berbasis NIK.
4. Penerapan Data Mining: Data dianalisis untuk menemukan pola layanan terbanyak dan wilayah dengan volume tinggi.
5. Penguatan Soft Skills dan Adaptasi Profesional: Pengalaman kedisiplinan, komunikasi formal, kerjatim, dan adaptasi kerja birokrasi.

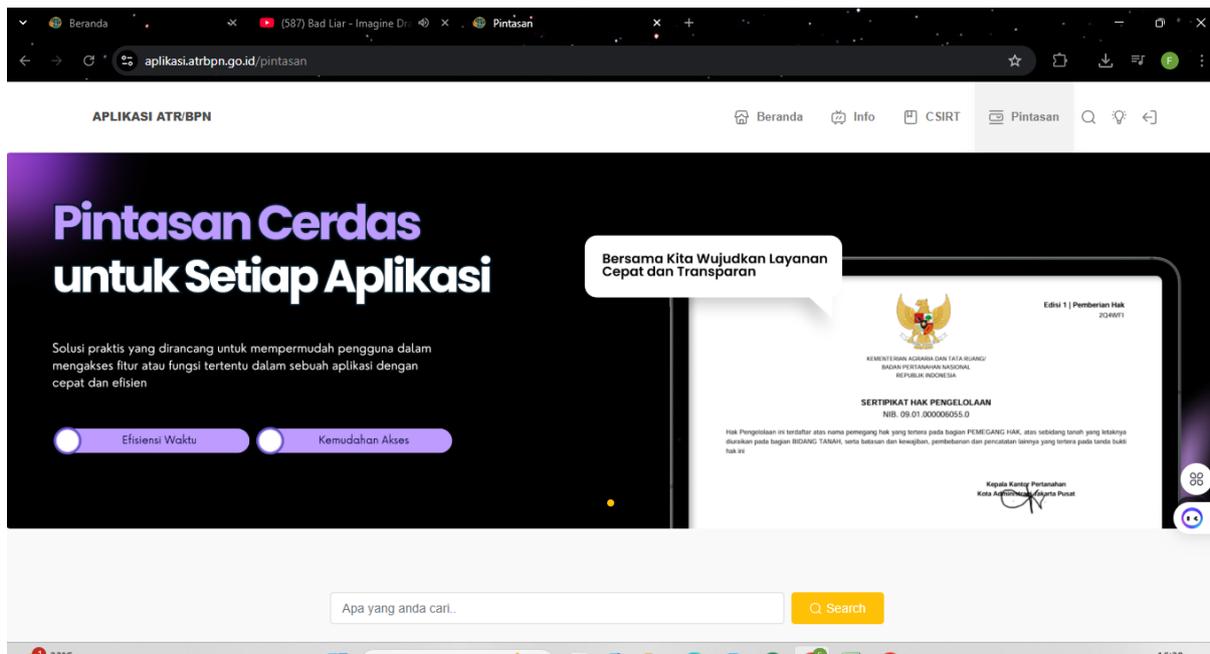
Kegiatan ini menunjukkan bahwa MBKM mampu menjadi jembatan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengembangkan kemampuan praktis dan profesional.

Berikut tabel Rekapitulasi Jumlah Permohonan Sertifikat Tanah di BPN Kabupaten Kuantan Singingi dan aplikasi yang di gunakan untuk Memproses Permohonan Sertifikat Tanah:

Tabel 1. Jumlah Permohonan Sertifikat Tanah di BPN Kabupaten Kuantan Singingi Periode Februari–Juni 2025

No	Kecamatan	Jumlah Permohonan
1	Marsawah	152
2	Sentajo Raya	98
3	Benai	75
4	Pangean	63
	Logas Tanah Darat	47

Keterangan: Tabel ini menunjukkan sebaran permohonan sertifikat tanah yang diterima BPN selama periode magang MBKM.



Gambar 1. Aplikasi Memproses Permohonan Sertifikat Tanah

Badan Pertanahan Nasional (BPN) secara bertahap telah melakukan transformasi layanan berbasis digital melalui sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang terintegrasi dengan berbagai layanan publik (ATR/BPN, 2023). Transformasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang lebih modern, efisien, dan transparan. Melalui sistem digital, pelayanan pertanahan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada proses manual yang seringkali memakan waktu dan rawan terjadi kesalahan, tetapi mulai diarahkan pada mekanisme elektronik yang lebih cepat dan akurat. Keberadaan KKP juga memungkinkan sinkronisasi data antar unit kerja BPN di berbagai daerah sehingga memudahkan monitoring dan pengawasan layanan pertanahan secara nasional.

Sejalan dengan upaya transformasi digital tersebut, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja nyata di luar kampus sebagai bentuk pembelajaran berbasis pengalaman (Kemdikbud, 2020). Program ini membuka ruang bagi mahasiswa, khususnya dari bidang ilmu komputer dan teknik informatika, untuk terlibat langsung dalam mendukung digitalisasi layanan publik. Melalui magang maupun proyek di instansi pemerintah, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktis, tetapi juga berkesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan akademik dalam menyelesaikan permasalahan riil di lapangan. Kolaborasi antara BPN dan mahasiswa melalui program MBKM diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan era digital.

Dalam konteks penerapan teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak memiliki peran sentral. Menurut Pressman (2014), rekayasa perangkat lunak membantu mengelola kompleksitas sistem informasi dan memastikan kualitas perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini relevan dengan digitalisasi layanan pertanahan yang melibatkan sistem berskala besar dengan basis data yang sangat kompleks. Tanpa penerapan prinsip rekayasa perangkat lunak yang tepat, sistem berpotensi menghadapi masalah seperti inkonsistensi data, performa lambat, atau bahkan kerentanan terhadap serangan siber. Oleh karena itu, penerapan metodologi pengembangan perangkat lunak yang sistematis, mulai dari tahap analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, hingga pemeliharaan, sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan transformasi digital di BPN.

Di sisi lain, digitalisasi layanan pertanahan juga menghadirkan tantangan serius dalam aspek keamanan data. Data pertanahan mencakup informasi kepemilikan, batas wilayah, hingga dokumen hukum yang bersifat sensitif. Menurut Sutarman (2016), data yang sensitif harus dilindungi melalui kebijakan pengamanan jaringan dan prosedur kontrol akses yang ketat. Hal ini berarti sistem pertanahan digital perlu dilengkapi dengan lapisan keamanan berlapis, seperti enkripsi data, otentikasi pengguna, serta monitoring aktivitas sistem untuk mencegah penyalahgunaan. Perlindungan data tidak hanya penting untuk menjaga privasi masyarakat, tetapi juga untuk memastikan integritas informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum maupun kebijakan pemerintah.

Selain keamanan, aspek pemanfaatan data juga menjadi perhatian utama. Marlinda (2020) menyebutkan bahwa teknik data mining memungkinkan organisasi menemukan pola-pola tersembunyi dalam data yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks BPN, data mining dapat digunakan untuk menganalisis tren permohonan sertifikat tanah, memetakan wilayah dengan potensi konflik agraria, hingga merancang kebijakan tata ruang berbasis data. Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya sebatas penyimpanan dan pengolahan data secara elektronik, tetapi juga harus mampu menghasilkan insight yang bermanfaat bagi perencanaan jangka panjang.

Dengan adanya sinergi antara transformasi digital di BPN, dukungan kebijakan MBKM, penerapan prinsip rekayasa perangkat lunak, perlindungan data yang kuat, serta pemanfaatan data mining, diharapkan tercipta ekosistem layanan pertanahan yang modern, aman, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah di era digital.

4. Simpulan

Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor BPN Kabupaten Kuantan Singingi berhasil memberikan pengalaman nyata yang sangat berharga bagi mahasiswa Program Studi Teknik Informatika. Melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas pelayanan digital pertanahan, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta magang, tetapi juga sebagai bagian dari tim yang mendukung proses transformasi digital di instansi pemerintah. Pengalaman ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan teori dan konsep yang telah diperoleh selama perkuliahan, sekaligus mengasah kemampuan problem solving dalam menghadapi permasalahan riil di lapangan.

Kegiatan MBKM di BPN juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana sistem informasi diterapkan dalam pelayanan publik. Mulai dari proses input data pertanahan, pemrosesan berkas, hingga pengelolaan database digital, semua menjadi ruang pembelajaran yang aplikatif. Mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja dengan data sensitif, sehingga dituntut untuk selalu menjaga etika profesional serta memahami pentingnya keamanan informasi. Di samping itu, interaksi langsung dengan pegawai BPN dan masyarakat pengguna layanan juga melatih kemampuan komunikasi, kolaborasi, serta sikap tanggung jawab.

Dengan demikian, program MBKM terbukti sebagai salah satu strategi penting dalam mempersiapkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja. Kompetensi teknis mahasiswa meningkat melalui penerapan keterampilan informatika di lingkungan birokrasi, sedangkan kompetensi non-teknis berkembang melalui pengalaman bekerja dalam tim, disiplin waktu, dan adaptasi terhadap budaya kerja instansi pemerintah. Lebih jauh lagi, keterlibatan mahasiswa dalam mendukung digitalisasi pertanahan sejalan dengan visi pemerintah dalam mempercepat transformasi digital sektor pelayanan publik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan MBKM di BPN Kuantan Singingi memberikan manfaat ganda: bagi mahasiswa sebagai pengalaman pembelajaran berbasis praktik, dan bagi

instansi sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak **Universitas Islam Kuantan Singingi** yang telah memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk fasilitas, arahan, maupun kesempatan untuk mengikuti program **Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada **Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi** sebagai mitra pelaksana, yang telah menerima mahasiswa dengan baik serta memberikan ruang bagi keterlibatan langsung dalam berbagai aktivitas pelayanan pertanahan berbasis digital. Selanjutnya, apresiasi mendalam penulis sampaikan kepada **seluruh dosen pembimbing** yang telah memberikan arahan akademik, motivasi, serta bimbingan konstruktif selama proses pelaksanaan kegiatan. Tidak lupa, penghargaan juga diberikan kepada **pegawai instansi BPN** yang telah mendampingi, membimbing, serta membantu mahasiswa dalam memahami alur kerja, prosedur pelayanan, dan tantangan nyata di lapangan.

Bimbingan, dukungan, dan kesempatan yang diberikan oleh seluruh pihak tersebut memiliki arti yang sangat besar bagi penulis. Melalui kerja sama dan kolaborasi yang baik, program MBKM ini dapat terlaksana dengan lancar, sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi teknis maupun non-teknis yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Daftar Pustaka

- [1]. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- [2]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- [3]. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- [4]. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2023). *Profil dan Informasi Layanan BPN Kuantan Singingi*. <https://www.atrbpn.go.id>
- [5]. Modul Resmi Program Studi Teknik Informatika – Universitas Islam Kuantan Singingi.
- [6]. Sutarman. (2016). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [7]. Pressman, R. S. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. New York: McGraw-Hill.
- [8]. Jogiyanto, H.M. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- [9]. Rainer, R. K., & Turban, E. (2009). *Introduction to Information Systems*. USA: Wiley.
- [10]. Marlinda, L. (2020). *Data Mining: Teori dan Implementasi*. Bandung: Informatika.
- [11]. Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering*. San Francisco: Morgan Kaufmann